



## **Dinamika Ekonomi Dinasti Fatimiyah: Strategi Kebijakan, Peran Tokoh, Dan Faktor Kemajuan Serta Kemundurannya**

**Nur Annisa<sup>1</sup>, Nasrullah Bin Sapa<sup>2</sup>, Mukhtar Lutfi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Korespondensi Penulis. E-mail: [annisaarief21@gmail.com](mailto:annisaarief21@gmail.com), Tlp: +628347779806

### **Submission Track:**

//Submitted: 17<sup>th</sup> January 2025 // Reviewed: 23<sup>rd</sup> February 2025 // Published: 23<sup>rd</sup> March 2025

Copyright © 2025 Nura Annisa, Nasrullah Bin Sapa, Mukhtar Lutfi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

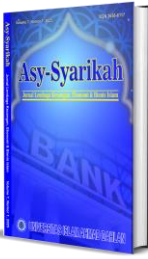
### **Abstrak**

Pembahasan Jurnal ini mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dinasti Syiah yang memerintah di Afrika Utara dan Mesir antara tahun 909 hingga 1171 M. Didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi, dinasti ini berkembang menjadi kekuatan besar dalam bidang politik dan ekonomi. Kejayaan ekonomi Fatimiyah didukung oleh berbagai kebijakan para khalifahnyanya, terutama Al-Mu'izz, Al-'Aziz, dan Al-Hakim, yang berfokus pada penguatan sektor pertanian, perdagangan, dan industri kerajinan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi mereka meliputi lokasi strategis setelah pemindahan ibu kota ke Mesir, sistem perpajakan dan bea cukai yang terorganisir dengan baik, serta hubungan dagang internasional yang stabil. Sektor-sektor utama yang dikembangkan mencakup pertanian, tekstil, dan perdagangan. Selain itu, pemikiran Ahmad Ibn Nasr al-Daudi memberikan sumbangan penting terhadap konsep keuangan Islam, terutama dalam sistem perpajakan dan distribusi zakat. Namun, kemunduran Dinasti Fatimiyah mulai terlihat akibat kebijakan diskriminatif terhadap Sunni, lemahnya kepemimpinan, serta dampak dari Perang Salib dan bencana alam. Pada akhirnya, dinasti ini runtuh setelah ditaklukkan oleh Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1171. Studi ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang kuat menjadi fondasi kejayaan suatu dinasti, tetapi kestabilan sosial dan politik tetap menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan kekuasaan.

**Kata kunci:** Dinasti Fatimiyah, Perekonomian, Perdagangan, Kemunduran Politik.

### **Abstract**

The discussion in this journal examines Islamic economic thought during the Fatimid Dynasty. The Fatimid Dynasty was a Shia ruling dynasty that governed North Africa and Egypt from 909 to 1171 AD. Founded by Ubaidillah al-Mahdi, this dynasty grew into a major political and economic power. The Fatimid economy flourished due to various



*policies implemented by its caliphs, particularly Al-Mu'izz, Al-'Aziz, and Al-Hakim, who prioritized the development of agriculture, trade, and handicraft industries. Several key factors contributed to their economic prosperity, including the strategic relocation of the capital to Egypt, an efficient taxation and customs system, and well-established international trade relations. The primary economic sectors developed during this period included agriculture, textiles, and commerce. Additionally, the economic ideas of Ahmad Ibn Nasr al-Daudi played a crucial role in shaping Islamic financial concepts, particularly in taxation and zakat distribution. However, the decline of the Fatimid Dynasty was triggered by discriminatory policies against Sunni Muslims, weak leadership, as well as the impact of the Crusades and natural disasters. Eventually, the dynasty fell after being conquered by Salahuddin al-Ayyubi in 1171. This study highlights that while strong economic policies can support a dynasty's prosperity, social and political stability remain essential for maintaining long-term rule.*

**Keywords:** *Fatimid Dynasty, Economic, Trade, Political Decline.*

## 1. Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam tentu selalu berkembang dan bergerak dinamis sesuai dengan zamannya. Sehingga dapat terlihat dewasa ini, inovasi-inovasi banyak dikembangkan mengalami perkembangan sangat signifikan sejalan dengan perkembangan teknologi. Namun pada dasarnya asas yang digunakan tidak akan terlepas dari ajaran-ajaran Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pemikiran ekonomi Islam sudah ada sejak era Nabi Muhammad SAW. Sejak ekonomi Islam diterapkan pada era Nabi Muhammad SAW, pemikiran-pemikiran yang diajarkan memberikan dasar untuk mengelolah kehidupan ekonomi manusia. Terdapat suatu kaidah yang diajarkan dalam Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi, bahwa “segala bentuk muamalah itu dibenarkan kecuali bila ada dalil yang melarangnya”. Hal tersebut menunjukkan tuntutan untuk menciptakan inovasi-inovasi demi tercapainya kemaslahatan umat (Mawahid, A dkk., 2024).

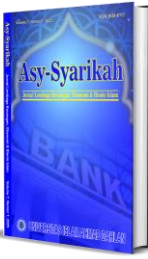
Ajaran dan pemikiran yang dibawa oleh Rasulullah akan terus berkembang dan berkelanjutan, hingga mencapai puncak kejayaannya seiring dengan kejayaan dan kemajuan peradaban Islam pada masa lampau. Pemahaman tersebut terus diwariskan dan dilanjutkan dari masa ke masa. Kepada para ulama dan cendekiawan Muslim yang terus berupaya menjaga dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi. Adapun tokoh Muslim terkemuka yang ikut andil dalam pengembangan ekonomi Islam antara lain Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Daudi, dan banyak lainnya. Dengan ketulusan,



tokoh muslim terkemuka terus memberi kontribusi pemikiran dan karya di bidang ekonomi, meskipun ada di antaranya mungkin tidak secara khusus membahasnya. Akan tetapi, kontribusi tokoh muslim ini sangat besar bagi dunia, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, dengan gagasan-gagasan yang turut memperkaya pemikiran ekonomi. Warisan Tokoh-tokoh menjadi wahana untuk mengenal dan Mempelajari sistem ekonomi Islam yang hingga kini masih diterapkan di berbagai belahan dunia, meskipun saat ini didominasi oleh sistem ekonomi lain seperti kapitalisme serta sosialisme (Mawahid, A dkk., 2024).

Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti dalam sejarah Islam yang memiliki peran penting terhadap perkembangan kebudayaan serta peradaban Islam secara umum. Seperti halnya Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak, serta Dinasti Umayyah yang berpusat di Syam, Dinasti Fatimiyah juga mengalami masa pertumbuhan dan kejayaan sebelum akhirnya mengalami kemunduran setelah berkuasa selama kurang lebih dua abad (Yusuf, 2023). Dinasti Fatimiyah dinamai berdasarkan salah satu putri Rasulullah saw yaitu Fatimah az-Zahra, karena pendiri dinasti ini menyatakan asal-usulnya kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad saw. Kemunculan pemerintahan Fatimiyah berawal pada gerakan pemberontakan kecil yang dilatarbelakangi oleh dendam kepada pemerintahan Dinasti Umayyah akibat peristiwa tragis pembantaian Husain dalam Perang Karbala.

Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa Dinasti Fatimiyah berkuasa dari 909-1171 M berhasil mencapai kemajuan-kemajuan spektakuler terutama ketika dijabat oleh Khalifah Al- Mu'izz (953-975 M), Al-'Aziz (975-996 M), dan Al-Hakim (996-1021 M). Ketiga khalifah tersebut mampu menjadikan dinasti Fatimiyah setara dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad, dan Umayyah di Spanyol berkat kemajuan terhadap berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, politik, sosial, budaya serta ilmu pengetahuan. Apalagi dalam bidang terakhir, sumbangsih dinasti Fatimiyah masih bisa dirasakan sampai saat ini melalui perguruan tinggi al-Azhar, Kairo, Mesir dijadikan tempat candra di muka menggodok intelektual-intelektual muslim di seluruh dunia. Para ulama besar berhasil lahir disana seperti Jalaluddin As-Suyuti, Imam Subki, al-Hafiz Ibnu



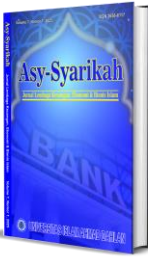
Hajar al-Asqalani, hingga Ustadz Abdul Somad dari Indonesia (Zamzam dkk., 2019).

Dengan tekad yang tak kenal lelah dari Dinasti Fatimiyah, ekonomi berkembang pesat pada masa kejayaannya. Para khalifah dan pejabat negara di tingkat pusat dan daerah menikmati kemakmuran yang melimpah, sementara masyarakat merasakan kehidupan yang sejahtera dan kaya (Andi Mutmainnah, et al, 2024). Pemikiran ekonomi Islam pada masa Fatimiyah berakar pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu prinsip ekonomi Islam yang diterapkan pada saat itu adalah prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Pemerintah berupaya meningkatkan distribusi kekayaan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan menetapkan pajak yang adil bagi masyarakat kaya. Selain itu, periode Fatimiyah menyaksikan perkembangan dalam bidang keuangan Islam, termasuk dikenalnya sistem perbankan syariah yang pertama kali diperkenalkan oleh Imam alQadi Abu Yusuf pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid pada abad ke-8 Masehi. Sistem perbankan Islam pada masa Fatimiyah didasarkan pada prinsip bagi hasil (mudharabah) dan peminjaman (murabahah) (Philip, 1973).

Artikel ini mengkaji ekonomi Islam pada masa Fatimiyah dengan merujuk pada penjelasan di atas. Tidak ada kemajuan peradaban bangsa manapun di dunia tanpa di sokong oleh ekonomi. Dalam sejarah Dinasti Fatimiyah, ada manfaatnya untuk mempertimbangkan dan mengkaji berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan khalifah agar dapat diterapkan dalam kehidupan modern.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan fakta yang ada (Creswell, J. W, 2018). Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alamiah,



di mana peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015). Langkah-langkah penelitian ini dilakukan secara sistematis dimulai dari identifikasi topik dan perumusan masalah, yaitu menentukan fokus penelitian mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Fatimiyah serta merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi dasar kajian. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data sekunder dengan menelaah berbagai literatur, termasuk buku sejarah Islam, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang membahas kebijakan ekonomi, sistem perpajakan, serta sektor ekonomi yang berkembang pada era Fatimiyah. Setelah data terkumpul, dilakukan evaluasi dan klasifikasi data dengan memilah informasi yang paling relevan dan mengelompokkannya ke dalam beberapa tema utama, seperti kebijakan ekonomi khalifah Fatimiyah, faktor kemajuan ekonomi, serta pemikiran Ahmad Ibn Nasr al-Daudi. Tahap berikutnya adalah analisis data secara induktif, di mana data yang telah diklasifikasikan dianalisis tanpa menggunakan hipotesis awal yang kaku. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, konsep, dan prinsip yang berkembang dalam sistem ekonomi Dinasti Fatimiyah (Zed, M, 2014). Dalam proses ini, dilakukan perbandingan antara berbagai sumber literatur guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait dinamika ekonomi Islam pada masa tersebut. Setelah analisis dilakukan, tahap selanjutnya adalah interpretasi dan penyusunan hasil penelitian, di mana temuan penelitian dirangkum dan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis agar memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan ekonomi Dinasti Fatimiyah, faktor pendukung kemajuannya, serta penyebab kemundurannya. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena mampu menggali makna dan konsep ekonomi Islam yang berkembang dalam konteks sejarah Dinasti Fatimiyah. Metode studi literatur juga memungkinkan peneliti memperoleh wawasan dari berbagai sumber akademik yang dapat dibandingkan dan dianalisis secara mendalam. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana kebijakan ekonomi yang diterapkan Dinasti



Fatimiyah berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam dan pelajaran yang dapat dipetik dari kejayaan maupun kemundurannya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Sejarah Berdirinya Dinasti Fatimiyah

Dinasti Fatimiyah merupakan satu-satunya dinasti Syi'ah pada sejarah Islam yang didirikan di Tunisia pada tahun 909 M sebagai tandingan kekuasaan Bani Abbasiyah yang saat itu berpusat di Baghdad. Berdasarkan keterangan dalam Ensiklopedi, kesuksesan pendirian Dinasti Fatimiyah dipengaruhi oleh rencana serta pengaturan yang terstruktur dengan baik. Para dai memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Syi'ah berhasil mengubah Maroko menjadi wilayah berhaluan Syi'ah. Deklarasi resmi berdirinya Dinasti Fatimiyah dilakukan di Raqqa pada 21 Rabiul Akhir 297 H. (15 Januari 910 M) (Abdul Mun'im & Al-Hafni, 2009).

Dinasti Fatimiyah mengklaim memiliki garis keturunan langsung dari pasangan Ali bin Ab Thalib dan Fatimah binti Rasulullah saw. Mereka meyakini bahwa Abu Abdullah al-Mahdi adalah cucu dari Ismail bin Ja'far al-Shadiq yang dianggap sebagai imam ketujuh dalam garis keturunan syi'ah. Setelah wafatnya Imam Ja'far al-Shadiq, Komunitas Syi'ah terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang mengakui Musa al-Kazim sebagai Imam ketujuh pengganti Imam Ja'far, sementara kelompok lainnya meyakini bahwa Ismail bin Muhammad al-Maktum adalah Imam Syi'ah ketujuh. Cabang syi'ah kedua ini dinamai Syi'ah Ismailiyah (Amin, 2010).

Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Sa'id bin Husain, yang diyakini sebagai keturunan dari pendiri sekte Ismailiyah yaitu 'Abdullah bin Maymun, seorang Persia. Dalam sejarah peradaban Islam, disebutkan bahwa Abdullah bin Maymun merintis syi'ah Islamiyah sebagai gerakan politik keagamaan. Kemunculan Sa'id sebagai penerus Ibn Maymun merupakan hasil dari propaganda sekte Ismailiyah yang sangat terorganisir dan efektif. Keberhasilan ini sebanding dengan pencapaian awal sekte tersebut yang pernah mengguncang kekuasaan kekhalifahan umayyah, Abu Abdullah al-Husayn al-Syi'I seorang penduduk asli



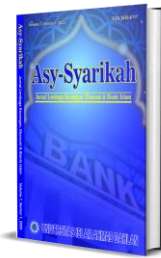
Shan'a Yaman. Pada awal abad ke-9, ia menyatakan dirinya sebagai pendukung Mahdi dan menyebarkan pengaruhnya di kalangan suku berber di Afrika utara, terutama suku Kitamah. Kontaknya pada suku ini terjadi saat musim haji di Mekkah. Pada masa itu, wilayah Afrika kecil, Tunisia dan Afrika utara berada di bawah kekuasaan dinasti Aghlabiyah (Supriadin J, 2020).

Keberhasilan besar yang dicapai oleh Al-Syi'I di wilayah asing mendesak Sa'id untuk meninggalkan pusat Islamiyah di Salamiyah dan melakukan perjalanan ke barat laut Afrika dengan menyamar sebagai pedagang. Namun, dalam perjalanannya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Sijilmasah atas perintah penguasa dinasti Aghlabiyah. Ziyadatullah (903-909), Said diselamatkan oleh al-Syi'I, yang kemudian pada tahun 909 berhasil menumbangkan Dinasti Aglabiyah yang telah berkuasa selama beberapa abad, serta mengusir keturunan terakhir Ziyadatullah keluar dari negeri itu. Dinasti Aglabiyah adalah benteng terakhir kekuatan Islam-Sunni di Afrika. Sa'id menyatakan dirinya sebagai penguasa dengan gelar Imam Ubaydullah al-Mahdi dan mengklaim sebagai keturunan Fatimah melalui al-Husain dan Isma'il. Dinasti yang ia dirikan dikenal sebagai Dinasti al-Ubaydiyah, meskipun sebagian pihak yang meragukan klaim keturunannya menyebutnya sebagai dinasti al-Ubaydiyah (Amin, 2010).

Menurut Prof Azumardi Azra, berdirinya Dinasti Fatimiyah dipengaruhi oleh kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Ubaidullah al-Mahdi membentuk Dinasti Fatimiyah yang terlepas dari kendali Abbasiyah (Azra, 2005). Pada awalnya, kaum Syi'ah bekerja sama dengan bani Abbasiyah guna menghancurkan dinasti Umayyah. Akan tetapi, setelah bani Abbasiyah meraih kekuasaan, mereka memonopoli pemerintahan, sehingga kaum Syi'ah melancarkan perlawanan melalui beberapa gerakan seperti Qaramithah dan Hasyasin. Akhirnya, berdirilah dinasti Fatimiyah di Tunisia dengan ibu kota di Qairawan, Afrika utara. (Tim Penyusun & Karya, 1996).

### 3.2 Kebijakan Ekonomi Khalifah Fatimiyah

Terdapat tiga khalifah dinasti Fatimiyah yang berhasil memperkuat perekonomian dinasti tersebut, sehingga menciptakan berbagai kemajuan yang



masih dapat dirasakan hingga saat ini.

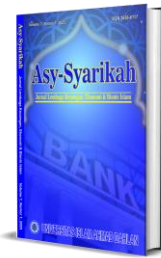
a. Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'izz lidinillah (341-365 H/953-975 M)

Khalifah Al-Mu'izz adalah pemimpin ke 4 dinasti fatimiyah yang berkuasa dari tahun 953 hingga 975 M. ia dikenal sebagai sosok yang baik, santun, dan peduli terhadap rakyatnya. Menurut ahmad syalabi, al-mu'izz dinillah memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai Bahasa, serta sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sastra. Ia juga dikenal cerdas dalam bersiasat dan mendapat penghormatan dari kawan maupun lawan.

Khalifah al-Mu'izz menerapkan strategi ekonomi dengan melakukan peninjauan menyeluruh ke seluruh wilayah kekuasaannya untuk memahami kondisi yang sebenarnya. Setelah itu, ia merumuskan program-program yang berfokus pada upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya (Pulungan, 2018). khalifah al-mu'izz memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan keamanan masyarakat, serta mendorong produktivitas disektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Ia juga mengembangkan berbagai industry seperti tenun, keramik, perhiasan emas, dan perak, peralatan kaca, kerajinan madu, ramu-ramuan, dengan pengobatan tradisional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemasukan negara melalui berbagai aktivitas produksi dan industry tersebut.

Pengembangan berbagai kerajinan oleh al-mu'izz berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga mereka dapat menikmati kemakmuran dan kemewahan dalam kehidupan. Selain itu, al-mu'izz mengeluarkan koin dinar (emas) sebagai mata uang resmi dinasti fatimiyah, karena ini memahami pentingnya koin sebagai sarana komunikasi kekuasaan kepada masyarakat di seluruh dunia Islam dan wilayah mediterania. Koin tersebut mencerminkan otoritas, kedaulatan dan legitimasi pemerintah, sekaligus menjadi symbol perubahan politik dan ideology negara. Dalam bidang hokum, al-mu'izz berkomitmen menegakkan keadilan secara adil tanpa diskriminasi dan memberikan toleransi kepada semua anggota masyarakat, tanpa memandang suku, golongan atau agama yang dianut (Buchori, 2009).

b. Abu Manshur Nizar Al-'Aziz Billah (365-386 H/975-996 M)



Khalifah Al-'Aziz adalah pemimpin ke 5 Dinasti Fatimiyah yang naik tahta pada usia 20 tahun menggantikan ayahnya, Al-Mu'izz. Ia dikenal sebagai khalifah yang pemberani, bijaksana, penyayang, ramah dan pendamai. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, Al-Aziz melakukan berbagai langkah penting di bidang kebudayaan dan kemasyarakatan. Ia memulai dengan pembangunan infrastruktur dan seni arsitektur, mendirikan banyak bangunan megah di kota kairo (Pulungan, 2018). Al-Aziz membangun sejumlah bangunan megah di kairoh, seperti the golden palace, the pear pavilion dan masjid karafa. Selain itu, ia menjalin hubungan persahabatan dengan amir buwaihiyyah, yang mewakili kekuasaan abbasiyah yang saat itu sedang melemah, dengan saling mengirim duta di antara kedua dinasti.

c. Abu Ali Manshur al-Hakim Ibn Amrillah (996-1021 M)

Al-Hakim naik tahta pada usia 11 tahun menggantikan ayahnya al-Aziz. Dalam menjalankan pemerintahan, ia dibantu oleh seorang wazir dan dipengaruhi secara negative oleh gubernurnya, barjawan, yang dikenal memiliki perilaku buruk dan tidak bermoral. Akibatnya, pada awal pemerintahannya terjadi banyak tindakan sewenang-wenang dan intoleransi, terutama terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Al-hakim diketahui membunuh sejumlah tokoh kerajaan tanpa alasan, memperlakukan kaum yahudi dan Kristen secara tidak adil, serta menyebabkan munculnya sekte druze dari ajaran syi'ah isma'iliyah di suriah selatan dan Lebanon, yang menganggapnya sebagai titisan Tuhan. Salah satu tindakan paling kontroversialnya adalah penganiayaan terhadap komunitas yahudi dan Kristen serta penghancuran tempat ibadah mereka, termasuk penghancuran makan suci di yerusalem pada tahun 1009 M. Tindakan ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya Perang Salib (Zamzam dkk., 2019).

### 3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemajuan Ekonomi Dinasti Fatimiyah

Dinasti fatimiyah adalah salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam setelah dinasti abbasiyah di Baghdad dan dinasti umayyah di Andalusia. Dinasti ini berkuasa selama sekitar 262 tahun, dari tahun 909 M hingga 1171 M, dengan



wilayah kekuasaan yang sangat luas hingga mencapai eropa (Musonnif, 2016).

Terdapat enam faktor utama yang berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi dinasti fatimiyah, yaitu :

#### 1. Perpindahan Pusat Pemerintahan dari Tunisia Ke Kairo

Strategi Jawhar As-Siqili untuk memindahkan pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah dari Tunisia ke Kairo ternyata sangat bijak. Dengan merebut kota politik Mesir dan mendirikan ibu kota baru bernama al-Qahirah, dinasti Fatimiyah kini berada di lokasi yang jauh lebih strategis dari segi geopolitik dan ekonomi. Mesir memiliki nilai strategis karena berdekatan dengan kawasan-kawasan penting lainnya serta menjadi pusat perdagangan internasional melalui Sungai Nil dan Laut Merah. Hal ini memungkinkan dinasti Fatimiyah memperluas pengaruhnya sekaligus memperoleh pendapatan besar dari sektor pertanian dan perdagangan yang berkembang pesat di wilayah baru ini. Dengan demikian, perpindahan ibukota dinasti ke Mesir ternyata mampu memperkuat fundamental dan memacu perkembangannya di berbagai bidang keilmuan, perdagangan, keagamaan, dan lainnya.

#### 2. Penggalian sumber pemasukan ekonomi dalam segala bidang

Para Khalifah Dinasti Fatimiyah sangat cerdas mengelola sumber pemasukan ekonomi negara. terdapat tiga sumber utama pemasukan ekonomi Dinasti Fatimiyah, yaitu :

##### a. Pajak

Sumber pemasukan utama keuangan negara Dinasti Fatimiyah berasal dari pajak pertanian dan peternakan. karena Mesir dikenal sebagai wilayah subur dengan kekayaan ternak seperti Kibar, Kambing dan Onta. Pajak pertanian dibayarkan setelah panen dan harus dilunasi sebelum musim tanam berikutnya. Dinasti Fatimiyah menerapkan system perhitungan pajak berdasarkan kesepakatan antara petani dan pemilik tanah. Para Penguasa, yang sebagian besa juga merupakan pemilik tanah, memberikan izin kepada petani untuk mengelola lahan tersebut.

Pajak yang dipungut oleh Perdana Menteri Ya'qub ibn Keles menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Di kawasan Fustat saja pajak



terkumpul mencapai antara 120.000 hingga 500.000 dinar perharinya. Sementara itu, pajak dari kota Dimyat melebihi 200.000 dinar per-harinya. Pada masa Wazir al-Hasan ibn. ‘Ali al-Yazuri, pendapatn pajak mencapai sekitar  $\pm$  2.000.000 dinar per tahun. Dengan tambahan 1 juta dinar per tahun dari wilayah syam. Pendapatan sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah mesir.

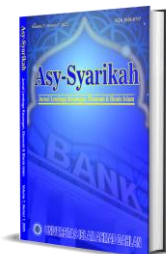
b. Al-Jawali/Jizyah (Pajak Keamanan)

Al-Jawali atau Jizyah merupakan pajak yang dikenakan pada non-muslim (kafir Zimmi) yang tinggal di wilayah Islam. pajak ini diwajibkan kepada laki-laki dewasa yang merdeka dan baligh, namun tidak berlaku bagi wanita serta anak-anak. Jizyah dipungut sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan kepada mereka dalam hal kehidupan, kekayaan beserta kebebasan beragama. Selain itu, mereka dibebaskan dari kewajiban militer dan dijamin keamanan sosialnya (Aravik, 2016). Sebagai ilustrasi, pendapatan dari system jawali pada tahun 587 M mencapai 30.000 dinar.

c. Al-Makus (Pajak atas Barang Perniagaan)

Al-Makus adalah pajak bea cukai yang dikenakan pada industri-industri. Ada dua jenis bea cukai yang diterapkan. Pertama, bea cukai yang dipungut dari barang-barang luar negeri yang masuk ke kota-kota Mesir, seperti Iskandariyah, Tunisiyah, Fushtah. Misalnya pedagang dari Konstantinopel dikenakan biaya 35 dinar dari setiap 100 dinar, yang berarti tariff bea cukainya mencapai 35 %. Kedua, bea cukai dikenakan pada industri-industri dan pedagang-pedagang lokal yang berada di wilayah Mesir.

Berkat pengelolaan sumber pemasukan negara yang efektif, Dinasti Fatimiyah mencapai tingkat kemakmuran yang melebihi Baghdad dan wilayah lainnya. Istana khalifah yang dihuni oleh sekitar 30.000 orang termasuk 1200 pelayan dan pegawai, selain itu, kota kairo baru diperkaya dengan mesjid-mesjid, perguruan tinggi, rumah sakit dan pemondokan khalifah yang berukuran sangat besar. Pasar-pasar yang ramai juga turut menghiasi kota tersebut. Pasar yang mempunyai 20.000 toko luar biasa besarnya dan dipenuhi berbagai produk dari seluruh dunia (Ajid, 2004). Pengelolaan bidang-bidang Pertanian, Perdagangan dan Industri secara terpadu



Pemerintah Mesir telah mengalokasikan banyak investasi dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam perdagangan umum dan industri. Mereka telah membangun sistem irigasi guna mengalirkan air dari Sungai Nil ke lahan pertanian, sementara lumpur dari Sungai Nil digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Pendapatan mereka berasal dari berbagai hasil pertanian seperti kurma, kapas, gandum, gula tebu, bawang merah dan lain-lain. Selain itu, mereka juga menganjurkan penggunaan kayu untuk pembangunan dermaga, kapal, dan kapal dagang.

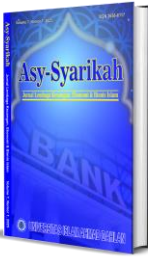
Dinasti Fatimiyah telah menjadi salah satu dinasti yang paling maju, sejajar dengan kemajuan Bani Abbasiyah di Bagdad dan Bani Umayyah di Cordoba, Andalusia, berkat strategi manajemen mereka dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Di bawah pemerintahan dinasti Fatimiyah, berbagai kota juga dilengkapi dengan fasilitas pemandian umum yang berkualitas (Susmihara, 2016).

### 3. Kepedulian yang tinggi terhadap Ilmu Pengetahuan

Kemajuan ekonomi suatu bangsa sangat tergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan. Dari zaman klasik hingga saat ini, tidak ada negara besar yang mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa dukungan ilmu pengetahuan yang signifikan. Para khalifah Fatimiyah dikenal sebagai pengagum ilmu pengetahuan. Al-Aziz mendirikan perpustakaan besar di istananya yang berisi satu juta buku mengenai berbagai ilmu pengetahuan. juga menyediakan asrama bagi para Fuqaha (guru) untuk mendukung kegiatan pendidikan mereka, dengan Khalifah menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya secara gratis sebagai sumber pendapatan utama mereka (Syamsuddin, 2013).

### 4. Adanya hubungan dagang yang harmonis dengan dunia non-Muslim

Toleransi terhadap non-Muslim di bawah kepemimpinan Khalifah al-Mu'izz dan al-Aziz menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan perdagangan. Pusat-pusat perdagangan tumbuh pesat di berbagai kota Mesir seperti Fustat, Kairo, dan Alexandria menjadi penting sebagai pelabuhan internasional. Kota-kota ini memfasilitasi perdagangan luar negeri seperti India dan negara-negara di Laut Tengah. Kehadiran berbagai pusat perdagangan



tersebut memberikan kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran masyarakat pada masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah (Andi & Mutmainnah, 2024).

Pemberian toleransi yang sangat tinggi terhadap masyarakat Khalifah al-Muizz dan al-Aziz dikenal kuat menerapkan prinsip toleransi beragama dan hak asasi manusia. Mereka memberikan kesempatan yang sama dalam penunjukan jabatan tanpa memandang latar belakang agama atau etnis, melainkan kompetensi (Karim, 2007). Hal ini terbukti dengan pengangkatan pejabat non-Muslim seperti Nasrani dan Yahudi ke posisi penting dalam pemerintahan. Masyarakat non-Muslim juga menikmati kehidupan yang damai dan sejahtera. Fatimiyah menjadikan Syiah Ismaili sebagai mazhab resmi namun tidak memaksa Sunni untuk mengikutinya. Kebijakan toleransi beragama dan hak asasi manusia ini berperan besar dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan meningkatkan perekonomian (Andi & Mutmainnah, 2024).

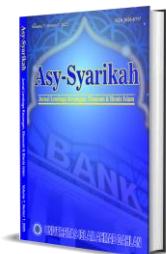
### 3.4 Sektor-Sektor Ekonomi yang Dibangun

Dinasti Fatimiyah menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan menggalakkan dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan memajukan kesejahteraan masyarakat lokal. Temuan ini menggambarkan sektor-sektor ekonomi yang didorong, diusulkan, dan ditingkatkan oleh Dinasti Fatimiyah.

#### a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Dalam konteks pembangunan ekonomi, Dinasti Fatimiyah mengutamakan sektorsektor seperti pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, dan perdagangan. Namun, di antara sektor-sektor tersebut, pertanian mendapat perhatian dan investasi yang lebih besar karena dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Mesir pada masa itu.

Sektor ini menghasilkan berbagai produk pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan masyarakat. Produk-produk tersebut meliputi gandum, kacang-kacangan, kedelai, adas, bawang putih, bawang merah, jinten, lobak, semangka, tebu, umbi-umbian, terong, kapas, dan lain sebagainya.



#### b. Sektor Kerajinan Pembinaan dan pengembangan

Salah satu strategi Dinasti Fatimiyah dalam mengelola sektor kerajinan adalah dengan mendirikan fasilitas pengolahan kerajinan tangan dan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksi mereka. Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor ini meliputi tekstil, kaca, kristal, gerabah, kapal, kertas, gula, minyak goreng, dan sabun. Selama periode Fatimiyah, terdapat banyak kapal terkenal yang dibuat, termasuk kapal untuk transportasi penumpang dan kargo, serta kapal yang digunakan dalam konteks perang atau perang saudara.

Bersamaan dengan meningkatnya produksi kertas, teknik penjilidan buku juga terus berkembang. Kulit juga digunakan untuk membuat tikar dan pelana kuda. Selain itu, produksi gula juga merupakan kerajinan penting pada masa Fatimiyah yang sangat diminati dan menjadi barang standar yang laris di pasar. Minyak nabati juga merupakan produk yang populer pada masa Fatimiyah. Guna mendorong pengembangan industri ini, Dinasti Fatimiyah mendirikan banyak pabrik pengolahan minyak nabati. Selain itu, kerajinan tangan lainnya termasuk pembuatan lilin dan sabun (Andi & Mutmainnah, 2024).

#### c. Sektor Perdagangan

Pada saat pemerintahan Dinasti Fatimiyah, sektor komersial berkembang dengan berhasil. Dua kota yang sangat signifikan sebagai tempat perdagangan adalah Fusthath dan Iskandariyah. Fusthath adalah yang terbesar di antara keduanya. Kota ini bukan hanya merupakan kota kuno yang pernah menjadi ibu kota Mesir, tetapi juga menjadi pusat perdagangan dan kerajinan terkemuka karena posisinya yang strategis di tepi Sungai Nil dan kemudahan akses dari berbagai arah, baik melalui darat maupun sungai.

### 3.5 Pemikiran Tokoh Ekonomi (Ahmad Ibn Nasr al-Daud)

Al-Daudi diketahui hidup di masa kejayaan daulah fatimiyah. Tahun kelahiran dan wafatnya tidak diketahui dengan pasti. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa Ahmad abn nasr al-daudi wafat pada tahun 402 H (1011 M). al-daudi merupakan seorang ilmuwan pemikiran ekonomi Islam, dengan karyanya yang berjudul al-amwal (Rizki, 2018). Kitab al-amwal karangan al-daudi berisi



pemikiran ekonomi terkait keuangan public Islam, konsep keadilan distribusi serta alokasi (R Abul & Mawahib, 2024).

#### a. Keuangan Public Al-Daudi

Dalam konsep keuangan public Islam, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila negara memiliki sumber daya ekonomi memadai untuk mendukung fungsi pemerintahan. Pengembangan keuangan public terbia menjadi empat kelompok yaitu: 1). Zakat, sebagai upaya mengurangi kemiskinan; 2) Kharaj, pajak tanah; 3) penyewaan sumber-sumber alam; 4). ‘Usyur (Bea Cukai). Dari keempat kelompok tersebut perolahan pajak tanah sebagai pendapatn utama Negara. Menurut al-daudi, ada beberapa jenis perpajakan dalam Islam :

##### 1. Pendapatan Dawriyyah (Priodik):

- a. Pajak tanah (Kharaj) yang dibayarkan oleh non-muslim maupun muslim yang mengelola lahan pertanian.
- b. Pajak keamanan (Jizyah), yaitu pajak yang dikenakan pada non-muslim sebagai bentuk kontribusi terhadap perlindungan negara.

##### 2. Pendapatan Gairah Darwiyah (Non-Priodik) :

- a. Fai’dan anfal (harta rampasan tanpa perang atau kelebihan harta dari musuh).
- b. Ghanimah (barang rampasan dari perang) yang sebagian disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

##### 3. Pendapatn umum Negara, terdiri dari zakat yang diperuntukkan bagi delapan golongan sesuai ketentuan dalam Al-Qur’an.

##### 4. Pendapat khusus Negara, diperoleh dari,

- a. tanah yang diperebutkan melalui perang
- b. tanah yang diperoleh secara damai
- c. tanah yang diserahkan pada penduduknya karena takut
- d. lahan tidur yang tidak dimanfaatkan, yang kemudian dikelola oleh negara untuk kepentingan umum (Hassan, M. K, 2011).

#### e. Konsep keadilan dalam distribusi ad-Daudi

##### 1. Kepemilikan harta

Al-daudi membagi kepemilikan dalam dua kelompok, yaitu



kepemilikan individu dengan prinsip bahwa segala sesuatu milik Allah, sedangkan manusia sebagai khalifah, yang mencakup hak manusia atas hasil yang telah diusahakannya. Menurut pandangan Al-Daudi, kepemilikan umum mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti tambang, air, rumput dana pi. Al-daudi membagi kepemilikan dalam 2 bentuk utama:

a. Kepemilikan Individu

Setiap individu memiliki hak kepemilikan atas usaha dan kerja kerasnya, tetapi dalam Islam, kepemilikan tetap berada di bawah prinsip bahwa semua milik Allah, dan manusia hanya sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas penggunaannya.

b. Kepemilikan Umum

Kekayaan yang bersifat vital bagi kehidupan masyarakat, seperti tambang, sumber air, dan lahan umum, dikelola oleh negara untuk kepentingan public (Mannan, M. A, 1993).

2. Keadilan distribusi dan alokasi

Kebahagiaan, kesejahteraan serta kedamaian adalah impian setiap individu serta masyarakat. Ketiga hal tersebut akan terwujud bila pendapatan negara didistribusikan secara adil dan tepat sasaran. Al-Daudi mengelompokkan distribusi harta ini menjadi dua yaitu; pertama, klasifikasi umum, maksudnya pendapatan didistribusikan untuk kepentingan negara. Kedua, klasifikasi khusus, maksudnya pendapatan negara disalurkan guna kepentingan masyarakat. Hal ini dicapai melalui penyaluran zakat dimana merupakan salah satu sistem jaminan sosial yang terpenting dalam Islam, yang memastikan bahwa golongan lemah tetap mendapatkan dukungan finansial (Kahf, M, 2003).

### 3.6 Kemunduran Dinasti Fatimiyah

Kemunduran ekonomi menjadi faktor utama runtuhnya dinasti fatimiyah, terutama pada masa pemerintahan khalifah al-adhid. Dinasti ini kemudian ditaklukan oleh pasukan ayyubiyah yang dipimpin oleh salahuddin al-ayyubi dan



juga terlibat dalam perang saudara serta pemberontakan Sunni yang berkelanjutan. Serangan Tentara Salib menyebabkan wilayah-wilayah pertanian utama terbengkalai, mengakibatkan pelemahan Dinasti Fatimiyah sementara memperkuat posisi lawannya.

Terdapat 4 faktor penting yang menyebabkan kemunduran ekonomi pada masa Dinasti Fatimiyah, yaitu (Andi & Mutmainnah, 2024) :

a. Kebencian berlebih dan Politik diskriminatif terhadap masyarakat Sunni

Untuk menjamin dominasi aliran Syiah Ismaili dalam aspek kepercayaan dan kekuasaan agama, para khalifah Fatimiyah mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan segala kelompok yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Contohnya, Khalifah al-Aziz menugaskan perdana menteri guna menulis serta menyusun buku komprehensif tentang Fiqih Syiah dan ajaran-ajaran penting para ulama Fuqaha. Semua pejabat diwajibkan berasal dari kalangan Syiah Ismaili, dan semua qadi atau hakim diharuskan mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syiah. Selanjutnya, mereka menyebarkan atau mengembangkan ajaran Syiah Ismaili di kalangan.

b. Kehidupan khalifah Fatimiyah yang melampaui batas

Beberapa khalifah fatimiyah yang pernah berkuasa dikenal karena gaya hidup mewah serta kemewahan yang berlebihan, yang menjadi alasan bagi orang-orang untuk mulai membenci mereka. Contohnya, seperti Az-Zahir (1021-1036 M), AlMusthansir (1036-1094 M), Al-Musta'li (1094-1101 M), dan Al-Amir (1101-1131 M), serta Hafiz (1131-1149 M), Azh-Zhafir (1149-1154 M), Al-Faiz (1154-1160 M), dan Al-'Adhid (1160-1171 M), yang terlibat dengan gaya hidup mewah dan tinggal di istana istana yang megah. Meskipun Kairo menikmati banyak kesenangan dalam kehidupan dunia, urusan politik biasanya diurus oleh perdana menteri (Wazir).

c. Perang Salib

Terjadinya Perang Salib telah menjadi pemicu kunci dalam mempercepat penurunan ekonomi dan kejatuhan Dinasti Fatimiyah. Terlebih lagi, terjadinya konflik yang mencapai puncaknya antara Dinasti Fatimiyah dan penduduk Mesir. Khalifah alAdid dan menterinya Abu Shuja Shawar bin Muahir terpaksa mencari



bantuan dari Nuruddin Zanki, penguasa Syam dan Aleppo, guna melawan Tentara Salib. Berkat bantuan ini, Tentara Salib akhirnya dipaksa untuk mundur dari Mesir. Namun, dana yang dialokasikan untuk perang Salib telah habis sepenuhnya, dan pasukan Nuruddin Zanki dipanggil untuk memberikan bantuan. Akibatnya, kekayaan negara terkuras, menyebabkan dampak negatif pada ekonomi dan ketentraman masyarakat.

#### d. Rapuhnya politik keagamaan khalifah Fatimiyah

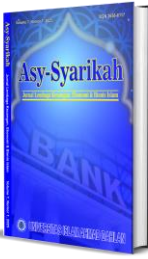
Kematian Khalifah al-Hakim menyebabkan kepemimpinan yang kurang kompeten mengemban tugasnya. Kekhalifahan sering kali hanya berperan sebagai simbol, dengan pelaksanaan tugas-tugasnya yang sebenarnya sering kali didelegasikan kepada perdana menteri (wazir). Sebab, ini karena penerus yang diangkat setelah kematian khalifah seringkali masih di bawah umur, seperti halnya al-Hakim yang menjadi khalifah diusia 11 tahun, al-Zahir yang naik takhta diusia 16 tahun, dan al-Mustansir yang menjadi khalifah diusia sebelas tahun, sementara Al-Amir berusia lima tahun, AlFaiz empat tahun, dan Al-Adid sembilan tahun ketika mereka naik takhta.

#### e. Bencana alam

Selama masa pemerintahan Khalifah al-Hakim, tampaknya Sungai Nil kehilangan pentingnya sebagai sumber perekonomian masyarakat. Bahkan, di bawah kepemimpinan Khalifah al-Zahir, dinasti Fatimiyah terus menghadapi masalah banjir, sementara kebijakan yang tidak populer terhadap perekonomian domestik menyebabkan kelangkaan pangan dan tidak terjangkaunya kenaikan harga barang bagi masyarakat. Karena ini menimbulkan ketidakpuasan luas di golongan penduduk. Selama masa pemerintahan Khalifah Ma'ad al-Muntashir, terjadi bencana kelaparan yang parah selama 7 Tahun (1065-1072 M). Sumber air utama di Mesir, Sungai Nil, mengalami dampak dari kekeringan yang meluas di seluruh negeri.

## 4. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu dinasti Syiah dalam sejarah Islam



yang didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi di Tunisia pada tahun 909 M dan berkuasa selama 262 tahun hingga runtuh pada 1171 M. Dinasti ini dipimpin oleh 14 khalifah yang memerintah di Afrika dan Mesir serta mengusung ideologi Syiah Ismailiyah yang meyakini bahwa kepemimpinan Islam harus berada di tangan keturunan Fatimah binti Rasulullah. Kemunculannya dipicu oleh persaingan dengan dua kekuatan politik besar saat itu, yakni Dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah II di Cordova.

Di bawah kepemimpinan beberapa khalifah, terutama Al-Mu'izz, Al-'Aziz, dan Al-Hakim, Dinasti Fatimiyah mengalami kemajuan pesat dalam berbagai aspek, terutama ekonomi. Al-Mu'izz meningkatkan sektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan, serta mencetak mata uang dinar sebagai alat transaksi. Al-'Aziz berfokus pada pembangunan infrastruktur dan stabilisasi hubungan dengan dinasti lain, sementara Al-Hakim menerapkan kebijakan yang kontroversial namun tetap memberikan dampak pada stabilitas ekonomi dan sosial. Keberhasilan ekonomi dinasti ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perpindahan ibu kota ke Mesir yang strategis, sistem perpajakan yang efektif, pengelolaan sektor pertanian, perdagangan, dan industri secara terpadu, serta kebijakan toleransi beragama yang menciptakan stabilitas sosial. Dinasti Fatimiyah juga mengembangkan sektor pertanian dengan produksi gandum, kacang-kacangan, dan tebu, serta meningkatkan industri kerajinan tangan dengan produksi tekstil, kertas, kapal, minyak, dan sabun.

Kota-kota seperti Fusthath dan Iskandariyah menjadi pusat perdagangan utama. Selain itu, pemikiran ekonomi Islam turut berkembang pada masa ini, dengan tokoh seperti Ahmad Ibn Nasr al-Daudi yang merumuskan sistem keuangan negara berbasis zakat, pajak tanah, penyewaan sumber daya alam, dan bea cukai, serta menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, kejayaan Dinasti Fatimiyah mulai meredup akibat berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kebijakan diskriminatif terhadap Sunni yang menimbulkan ketegangan sosial, gaya hidup boros para khalifah, dampak Perang Salib yang menguras sumber daya, lemahnya kepemimpinan setelah kematian Al-



Hakim, serta bencana alam yang memperburuk kondisi ekonomi. Situasi ini semakin memperlemah Dinasti Fatimiyah, hingga akhirnya Salahuddin al-Ayyubi mengambil alih kekuasaan pada tahun 1171 M, menandai runtuhnya dinasti ini dan kembalinya dominasi Sunni di Mesir.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im, & Al-Hafni. (2009). *Ensiklopedi Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam Seluruh Dunia*. PT. Grafindo Khazanah Ilmu.
- Ajid, T. (2004). *Perkembangan Pendapatan di Kawasan Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amin, S. M. (2010). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- Andi, & Mutmainnah. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Fatimiyah. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 161–184.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam; Konsep, Teori dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*. Empat Dua Intranspublishing.
- Azra, A. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Ikhtiar Baru Van Hoove.
- Buchori, D. S. (2009). *Sejarah Politik Islam*. Pustaka Intermasa.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Hassan, M. K. (2011). *Islamic Economics: Principles & Analysis*. Routledge.
- Kahf, M. (2003). *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. Routledge.
- Karim, M. A. (2007). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Books Publisher.
- Mannan, M. A. (1993). *Understanding Islamic Finance*. IDB Institute.
- Mawahid, A, Sudirman, & Parakkasi, I. (2024). Membangun Ekonomi dalam Tinjauan Historis Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Fatimiyah. *OIKONOMIA: Journal of Business Economics and Management*, 1(1).



- Musonnif, A. (2016). *Pemikiran Shi'ah Ismailiyah Tentang Kalender Islam; Tinjauan atas Sistem Kalender Hisabi Dinasti Fatimiyah, Kontemplasi*. 4(2). <https://doi.org/10.21274/kontem.2016.4.2.231> - 252
- Philip, K. H. (1973). *History of the Arabs*. Macmillan, Edisi X.
- Pulungan, S. (2018). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- R Abul, & Mawahib. (2024). Membangun Ekonomi Dalam Tinjauan Historis Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Fatimiyah. *Journal of Business Economics and Management*, 1(1), 1–7.
- Rizki, S. (2018). Analisis Pemikiran Ahmad Ibn Nasr Al-Daudi (W. 402h/1011M) Tentang Keuangan Publik Studi Kitab Al-Amwal. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 29–41.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriadin J, I. (2020). Dinasti Fatimiyah: Analisis Kemajuan Dan Runtuhnya Peradaban Islam Di Mesir. *Jurnal studi Islam*, 2(1), 101–116.
- Susmihara. (2016). Dinasti Fatimiyah; Muncul, Perkembangan dan Kehancurannya. *Jurnal Rihlah*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/rihlah.v4i2.2830>
- Syamsuddin, N. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Yayasan Pustaka Riau.
- Tim Penyusun, & Karya, S. (1996). *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Yusuf, M. (2023). Perkembangan Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah di Mesir (Pembentukan, Kemajuan dan Kemunduran). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2267–2274.
- Zamzam, Fakhry, & Aravik, H. (2019). Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(1), 99–116.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.